



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURWAHIDA RAHMAH
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN NEGARA URUSAN PEMERINTAHAN
3. NHK : 508819

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 864.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/110 m2 di KOTA BIMA ,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 270.000.000
2. Tanah Seluas 1515 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
3. Tanah Seluas 1380 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
4. Tanah Seluas 5032 m2 di BIMA, HIBAH TANPA AKTA Rp.
460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 202.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 84.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.151.500.000

III. HUTANG

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 981.500.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.